

LAPORAN PENELITIAN
DANA SPP/DPP UNAND 1995/1996
NO. KONTRAK: 42/LP-UA/SPP/DPP/-04/1995

18/01
C1
45

PELAKSANAAN INPRES NOMOR 5 TAHUN 1993
TENTANG PENINGKATAN PENANGGULANGAN KE-
MISKINAN DI KOTAHADYA PADANG

Oleh:

YUSLIM, SH. MB
FAKULTAS HUKUM



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KESUKSESAN
Lembaga Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 1995

A B S T R A K

PELAKSANAAN INPRES NOMOR 5 TAHUN 1993 TENTANG PENINGKATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTAMADYA PADANG

oleh : Yuslim, SH.MH.

Dalam penelitian metoda yang digunakan adalah deskriptif. Jadi penelitian bersifat kuantitatif dengan melakukan pendekatan sosiologis, juridis. Hasil yang diperoleh dianalisis tanpa menggunakan statistik.

Di Daerah Tingkat II Kotamadya Padang terdapat 193 kelurahan, diantaranya untuk tahun 1994/1995 terdapat 18 kelurahan yang dikategorikan miskin sebagai penerima program bantuan IDT. Di Kelurahan yang diteliti terdapat kegiatan usaha masyarakat dengan kegiatan usaha nelayan, sulam indah, rajutan, peternakan, perikanan.

Kelompok masyarakat penerima IDT tersebut berjumlah 30 KK dengan 451 tanggungan. Pembentukan kelompok masyarakat jika diperhatikan telah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam inpres no. 5 tahun 1993.

Penyaluran dana kepada kelompok masyarakat penerima IDT tidak sesuai dengan Inpres, karena masyarakat diberikan ternak atau modal kerja lainnya. Hal itu jelas bukan bersifat mendidik.

Kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat untuk ternak ayam dan itik lebih 70 % mengalami kegagalan, sedangkan ternak pengemukan sapi meskipun tidak gagal, tetapi setelah dipelihara selama 6 bulan hasilnya baru seharga sapi ketika baru diterima kelompok masyarakat.

Program IDT yang telah mulai dicicil oleh masyarakat terdapat di Ps. Ulak Karang, pencicilannya sudah dilakukan sejak Januari 1995. Jelas pada program pertama IDT ini terlihat banyak kegagalannya.

SAB. I

P E N D A H U L U A N

A. Latar belakang masalah

Ketetapan MPR No. II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara menempatkan manusia sebagai pusat segenap upaya pembangunan. Pembangunan nasional yang dilakukan bermuara pada manusia sebagai insan yang harus dibangun kehidupannya dan sekaligus sebagai sumber daya pembangunan yang harus terus ditingkatkan kualitas dan kemampuannya untuk meningkatkan harkat dan martabatnya. Upaya itu sebagai sasaran dari pembangunan jangka panjang kedua, yaitu terciptanya kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri.

Pelaksanaan pembangunan selama 25 tahun pertama telah berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin dari 70 juta menjadi 27 juta. Meskipun telah terjadi pengurangan penduduk miskin, namun jumlah yang tinggal masih sangat besar. Untuk mengatasi persoalan itu diperlukan upaya, langkah-langkah agar kemiskinan itu dapat dientaskan.

Dalam Pelita IV sekarang ini pemerintah telah melancarkan program khusus untuk mengendaskan kemiskinan penduduk yang dikenal dengan Inpres Desa Tertinggal. Inpres ini dimaksudkan untuk meningkatkan penanganan kemiskinan berkelanjutan di desa tertinggal. Melalui Inpres ini akan dipadukan program sektoral dan regional yang mencakup desa tersebut.

Dalam program Inpres Desa Tertinggal pemerintah menyediakan dana sebagai modal kerja bagi penduduk miskin, ia juga disertai bimbingan dan pendamping khusus dalam kegiatan usaha yang dilakukan. Pelaksanaan program Inpres Desa Tertinggal ini dilakukan langsung oleh masyarakat desa tertinggal itu sendiri, dibantu oleh

aparatur pemerintah pada tingkat yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan rakyat itu.

Dana yang diberikan sebagai modal kerja itu diharapkan kesinambungan pemanfaatannya sehingga abadi karena digunakan secara bergulir, sebagai modal untuk memupuk kemampuan yang lebih besar. Dengan demikian dana yang diberikan bukan bantuan cuma-cuma, tetapi bantuan modal yang sahnya nanti harus dikembalikan. Jadi IDT memang berbeda dengan bantuan desa (Bandes) yang diterima desa setiap tahun.

Intruksi Presiden No. 5 tahun 1993 telah memberikan pedoman secara jelas mengenai pelaksanaan program tersebut, di antaranya organisasi pelaksana tingkat pusat, ditingkat daerah dan ditingkat desa; pembentukan kelompok masyarakat; tata cara penyusunan kegiatan ; penyediaan dan penyaluran dana; pengendalian pengawasan,; sistem pelaporan dan lain-lain.

Intruksi Presiden sebagai pedoman bagi segenap jajaran pemerintahan dalam melaksanakan program IDT harus dilaksanakan sebagaimana yang telah digariskan. Suatu pertanyaan yang dapat diajukan adalah apakah pelaksanaan IDT telah sesuai dengan apa yang telah digariskan. Mengingat materi yang diatur dalam Inpres No. 5 tahun 1993 tersebut sangat luas tidak semua persoalan yang akan dikaji. Untuk itu beberapa masalah yang akan diteliti akan dapat dipahami dalam persoalan-persoalan yang akan dimunculkan dalam latar belakang ini.

Keberhasilan pelaksanaan program Inpres Desa Tertinggal akan sangat ditentukan oleh organisasi pelaksana ditingkat pemerintahan yang langsung berhubungan dengan warga desa yang menerima IDT itu. Hal ini akan dapat menimbulkan pertanyaan sejauh mana peran dari organisasi pada tingkat pemerintahan itu. Persoalan itu akan diteliti pada desa yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini.

BAB. V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi umum tempat penelitian

Program Inpres Desa Tertinggal mulai digulir di Indonesia tahun anggaran 1994/1995. Daerah Tingkat II Kotamadya Padang salah satu Daerah Tingkat II Kotamadya yang memiliki Desa/Kelurahan miskin. Daerah Tingkat II Kotamadya Padang terdiri dari 11 Kecamatan dengan 193 Kelurahan dengan 647.686 jiwa penduduk. Untuk jelasnya di bawah ini akan digambarkan Kecamatan, Kelurahan dan penduduk tersebut.

Tabel 1 : Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Penduduk di Daerah Tingkat II Kotamadya Padang

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JLM PENDUDUK
1	Bungus T. Kabung	13	18.008
2	L. Kilangan	7	31.876
3	L. Bagalung	21	73.916
4	Pdg. Selatan	24	60.736
5	Pdg. Timur	27	81.742
6	Pdg. Barat	30	74.916
7.	Pdg. Utara	18	68.688
8	Nanggale	7	48.689
9	Kuranji	9	66.413
10	P a u h	13	33.633
11	Koto Tengah	24	89.718
	11	193	647.686

Sumber : Kotamadya Padang Dalam Angka Kantor Bangdes 1992.

Dari 193 Kelurahan yang ada pada tahun 1994 telah dilakukan pendataan Kelurahan mana yang masuk ke-

BAB. VI

P E N U T U P

A. K e s i m p u l a n

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan pada bagian terdahulu, maka sekarang penulis akan mencoba menarik kesimpulan sebagai berikut :

- Di Kotamadya Daerah Tingkat II Padang tahun anggaran 1994/1995 terdapat 18 Kelurahan miskin sebagai penerima program bantuan IDT, yang tersebar di 9 Kecamatan dari 11 Kecamatan di Kotamadya Padang.
- Terdapatnya 18 Kelurahan penerima program IDT berarti angka itu mencapai 9,3 % kelurahan tergolong miskin di antara 193 kelurahan di kotamadya Padang.
- Pada tahun 1994/1995 masing-masing kelurahan miskin kelompok masyarakat yang menerima program IDT berjumlah 30 K.K dengan bantuan bervariasi sesuai dengan skala kegiatan usaha yang dilakukannya.
- Kegiatan usaha yang dilakukan oleh kelompok masyarakat mencakup bidang kegiatan yaitu :
 - peternakan
 - perikanan
 - industriUntuk peternakan aktivitasnya bervariasi dalam bidang-bidang usaha mencakupi pengemukan sapi, ternak ayam, baik ayam potong maupun petelur, ternak itik, ternak kambing.
- Pembentukan kelompok masyarakat dilihat dari prosedurnya telah sesuai dengan pedoman dalam Inpres No. 5 tahun 1993.
- Dalam penyaluran dana terdapat penyimpangan dari pedoman yang ditetapkan dalam Inpres, karena masyarakat bukan menerima uang sebagaimana seharusnya, tetapi menerima ternak, anak ayam, sapi, makanan ternak obat-obatan, uang diterima hanya pembuatan kandang.

- Hasil yang diperoleh oleh warga masyarakat dalam bantuan IDT, untuk tahun anggaran ini di kelurahan yang diteliti bagi peternakan ayam dan itik nampaknya mengalami kegagalan mencapai 70 %, sedang untuk ternak sapi harga beli yang diterima kelompok masyarakat terlalu tinggi, sehingga setelah dipelihara selama 6 bulan harga jual baru mencapai harga beli.
- Untuk kegiatan usaha nelayan dan industri kerajinan tangan telah menunjukkan hasil yang menggembirakan sehingga sudah ada kelompok masyarakat yang melakukan pengguliran dana lewat membayar cicilan.

B. Saran-saran

- Perlu diadakan pengkajian yang mendalam mengenai kegiatan usaha yang diajukan di bawah bimbingan tim teknis yang handal, supaya jangan sampai muncul kegagalan lagi.
- Penyaluran dana kepada kelompok masyarakat harus sesuai ketentuan yakni yang diterima warga harus dalam bentuk uang sehingga ada kemandirian dalam pertanggung jawabannya.
- Kegiatan usaha beresiko tinggi seperti peternakan ayam ras, harus dibawah bimbingan tenaga yang ahli dan berpengalaman.

oooOooo

DAFTAR LITERATUR

1. B. P 7 Pusat, Bahan penataran P-4 Pola terpadu bagi pegawai negeri Republik Indonesia, Jakarta 1993.
2. Departemen Dalam Negeri, Buku pedoman program IDT, Jakarta 1993.
3. Murbyarto, Ideologi Pancasila dalam kehidupan ekonomi, suatu artikel pada Pancasila sebagai ideologi terbuka, B.P 7 Pusat, Jakarta.
4. Kansil, Desa Kita, dalam peraturan tatapemerintahan desa, Ghalia Indonesia, Jakarta.
5. Momon Soetisna sendjaya Cs, Pokok-pokok pemerintahan daerah dan desa, Alumni, Bandung 1983.
6. Undang-undang No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa.

oooOooo